

Efektivitas Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga Rentan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan

Ervan Yuliansyah¹, Ika Devy Pramudiana^{2*}, Widyawati³, Sapto Pramono⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya

*Korespondensi penulis: ika.devy@unitomo.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of implementing the Government Food Reserve (CPP) program in supporting the food security of vulnerable families in Godog Village, Laren Subdistrict, Lamongan Regency. Since 2022, the CPP program has been designed to assist communities affected by food insecurity by providing food aid in the form of 10 kg rice packages. The study employs a qualitative approach with a descriptive research type. The focus lies on analyzing the program's implementation and the factors influencing its success, using Edward III's theory, which includes four key elements: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving beneficiaries, village officials, and aid distribution personnel. The findings indicate that the CPP program in Godog Village has significantly benefited vulnerable families by improving their food security but still faces several challenges. Good communication between the village government and the community, as well as the availability of resources, serve as the primary supporting factors for smooth aid distribution. Conversely, the main challenges arise from poor road infrastructure, which hampers aid distribution, and issues in updating the Beneficiary Family (KPM) data. The study recommends improving infrastructure and updating KPM data as strategic steps to enhance the program's implementation effectiveness.*

Keywords: *Food Reserves, Food Security, Implementation Effectiveness, Vulnerable Families.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga rentan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Program CPP sejak tahun 2022 dirancang untuk membantu masyarakat yang terdampak kerawanan pangan dengan menyediakan bantuan pangan berupa paket beras 10 kg. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian terletak pada analisis implementasi program serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dengan menggunakan teori Edward III yang melibatkan empat elemen utama meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dengan melibatkan penerima manfaat, aparat desa, dan petugas distribusi bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CPP di Desa Godog telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga rentan, namun masih menghadapi beberapa kendala. Faktor komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya menjadi faktor pendukung utama dalam kelancaran distribusi bantuan. Sebaliknya, tantangan utama muncul dari infrastruktur jalan yang buruk sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bantuan, serta masalah dalam pembaruan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian ini menyarankan peningkatan infrastruktur dan pembaruan data KPM sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.

Kata Kunci: Cadangan Pangan, Ketahanan Pangan, Keluarga Rentan, Efektivitas Implementasi.

1. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun aksesibilitas, sehingga dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif (Puspitaningrum et al., 2023). Di Indonesia, masih terdapat keluarga rentan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan pokok akibat kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, serta ketiadaan cadangan pangan yang memadai. Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, adalah wilayah yang mencerminkan salah satu kondisi tersebut. Mayoritas penduduk Desa Godog bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan rendah dan tidak menentu, sehingga mereka rentan terhadap dampak inflasi harga pangan dan kondisi paceklik.

Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan keluarga rentan, pemerintah menginisiasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Program CPP merupakan upaya strategis pemerintah dalam memastikan stabilitas pasokan pangan nasional dan bertujuan untuk menyediakan cadangan pangan dalam bentuk bahan pokok seperti paket beras 10 kg yang didistribusikan secara berkala kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Desa Godog, program CPP mulai diimplementasikan pada tahun 2022 dengan harapan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, sekaligus memastikan mereka tetap memiliki akses pangan yang layak (Badan Pangan Nasional, 2024).

Meskipun program CPP telah memberikan dampak positif, seperti diungkapkan oleh penerima manfaat yang merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program. Masalah seperti keterlambatan distribusi akibat kerusakan infrastruktur jalan, ketidaktepatan pendataan penerima manfaat, dan kompleksitas birokrasi menjadi kendala yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program. Selain itu, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang melibatkan berbagai pihak.

Dalam hal ini, penulis tertarik mengambil judul “Efektivitas Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga Rentan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan” karena program CPP merupakan salah satu intervensi penting dalam mendukung ketahanan pangan keluarga miskin di wilayah pedesaan. Judul ini juga mencerminkan fokus utama penelitian, yakni mengevaluasi sejauh

mana program ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat rentan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Alasan Desa Godog dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya yang relevan dengan tujuan program CPP. Desa ini memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, dengan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian subsistem. Selain itu, implementasi program CPP di Desa Godog telah berlangsung selama beberapa tahun sehingga memungkinkan dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak dan efektivitas program. Pilihan lokasi ini juga didasarkan pada variasi respon masyarakat dan hambatan teknis yang ditemukan selama pelaksanaan program, seperti masalah infrastruktur dan pendataan penerima manfaat.

Penelitian ini menjadi penting karena menysasar isu ketahanan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk menjamin kesejahteraan keluarga rentan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi praktis dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Godog serta di wilayah yang serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam penyempurnaan program ketahanan pangan di daerah-daerah rentan lainnya di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Efektivitas

Menurut Sedarmayanti dan Rozatin dalam (Murdani et al., 2023) menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pendapat tersebut mengemukakan bahwa efektivitas adalah indikator penting yang menunjukkan pencapaian sasaran lembaga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sangat penting dalam setiap lembaga untuk mengevaluasi perkembangan dan kemajuan yang dicapai.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (Salvator & K. Heremba, 2023), efektivitas didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu, yang bertujuan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang sedang dijalankan. Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Semakin dekat hasil kegiatan dengan sasaran yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.

Berdasarkan pemahaman tentang efektivitas menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah

ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas berfungsi sebagai indikator penting dalam mengevaluasi pencapaian sasaran lembaga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengukur sejauh mana sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Semakin dekat hasil kegiatan dengan sasaran yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas suatu program atau kegiatan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (Mirza & Aisyah, 2020), implementasi kebijakan pada dasarnya adalah proses penyampaian hasil kebijakan (*policy output*) oleh pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Pada tahap ini, berbagai pihak seperti aparat pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut melalui tindakan nyata di lapangan.

Dalam proses implementasi kebijakan, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, serta pemahaman yang jelas mengenai tujuan kebijakan yang ingin dicapai (Khaerudin et al., 2024).

Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Implementasi Kebijakan

George C. Edwards III menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang bersifat dinamis, dimana berbagai faktor saling berinteraksi dan memengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan. Untuk memahami keberhasilan atau kegagalan implementasi, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam proses ini. Edwards III mengemukakan empat faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi meliputi (Ariska, 2023):

- a) *Communication* (Komunikasi): Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Dimensi transmisi mengharuskan kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi konsistensi yaitu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap konsisten dan tidak membingungkan pelaksana maupun pihak-pihak terkait,

sehingga keputusan dan perintah pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan jelas dan tepat. Sementara itu, dimensi kejelasan menekankan pentingnya penyampaian kebijakan secara jelas, sehingga pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lainnya dapat memahami tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan serta mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan program (Kusumawardani & Isbandono, 2024).

- b) *Resources* (Sumber Daya): Sumber daya memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, peralatan, informasi, dan kewenangan. Pada aspek sumber daya manusia, dibutuhkan aparatur yang terampil dan kompeten dalam menangani tugas yang sedang dilaksanakan. Sumber daya juga berperan penting, karena keterbatasannya dapat mengurangi kualitas pelayanan publik dan menurunkan motivasi pelaksana. Selain itu, sumber daya peralatan seperti gedung dan sarana lainnya menjadi faktor kunci dalam operasional kebijakan. Terbatasnya fasilitas peralatan dapat menghambat pengumpulan informasi yang akurat dan menurunkan akuntabilitas. Ketersediaan informasi yang relevan serta kewenangan yang cukup bagi pelaksana juga sangat diperlukan agar keputusan dapat diambil dengan tepat, mencegah kesalahan dalam interpretasi, dan memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rahmatillah et al., 2023).
- c) *Disposition* (Disposisi atau Sikap Pelaksana): Disposisi merujuk pada karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang baik, maka mereka akan melaksanakan kebijakan dengan efektif, sesuai dengan sasaran, tujuan, dan harapan dari pembuat kebijakan (Triyono et al., 2024).
- d) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi): Struktur birokrasi merupakan salah satu elemen esensial dalam implementasi kebijakan. Meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana memiliki pemahaman serta komitmen untuk melaksanakan kebijakan, implementasi berpotensi mengalami kegagalan apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kompleksitas kebijakan seringkali memerlukan koordinasi dari berbagai pihak. Namun, apabila struktur birokrasi tidak mendukung pelaksanaan kebijakan, hal tersebut dapat mengakibatkan sumber daya tidak termanfaatkan secara optimal dan menurunnya motivasi, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan (Sulistiawati et al., 2024).

Pengertian Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Menurut laman resmi (Badan Pangan Nasional, 2024), program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) resmi diluncurkan pada tahun 2022 sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Program ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Program CPP merupakan salah satu upaya strategis pemerintah Indonesia untuk memastikan stabilitas pasokan pangan nasional, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, krisis pangan, atau fluktuasi harga bahan pangan pokok (Seftiyana & Alwi, 2024). Program ini melibatkan pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyaluran paket beras 10 kg per bulan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berada di garis kemiskinan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024).

Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional (BPN) memiliki peran sentral dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan. BPN bekerja sama dengan Perum BULOG yang bertugas mengelola logistik dan penyimpanan cadangan pangan, termasuk pengadaan dan distribusi bahan pangan strategis, seperti beras paketan. BULOG memastikan bahwa cadangan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat didistribusikan secara tepat waktu, khususnya pada kelompok masyarakat rentan (Santoso & Angela, 2023).

Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menasar ke keluarga miskin atau kelompok rentan yang membutuhkan bantuan pangan. Proses distribusinya dilakukan melalui jaringan desa, kecamatan, atau agen distribusi yang berfungsi untuk memastikan bahwa bantuan pangan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini juga mendukung program pemerintah lainnya, seperti penanggulangan gizi buruk dan stunting yang seringkali terjadi di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan pangan yang tinggi. Koordinasi antara BPN, BULOG, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam menciptakan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan (Husen et al., 2023).

Syarat dan Kriteria Calon Penerima Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Calon penerima program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) umumnya dipilih berdasarkan beberapa syarat dan kriteria yang ditetapkan untuk memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Syarat dan kriteria tersebut meliputi (Dinas Pangan dan Tanaman Pangan serta Hortikultura, 2022):

- a) Terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH): Keluarga yang terdaftar dalam PKH menjadi prioritas penerima bantuan karena mereka sudah teridentifikasi sebagai keluarga miskin atau rentan yang membutuhkan bantuan sosial.
- b) Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Keluarga yang memiliki KKS atau Kartu Miskin juga menjadi target utama penerima CPP, karena mereka termasuk dalam kategori keluarga miskin yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- c) Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Data yang tercatat dalam DTKS digunakan untuk menentukan keluarga yang layak menerima bantuan, dengan fokus pada keluarga miskin, rentan, dan yang membutuhkan bantuan pangan.
- d) Keluarga Miskin atau Rentan Ekonomi: Program ini menyasar ke keluarga dengan penghasilan rendah, kesulitan ekonomi, dan berada dalam kondisi darurat atau kerawanan pangan.
- e) Kelompok Rentan: Penerima bantuan meliputi keluarga yang memiliki anak balita, ibu hamil, lansia, atau yang mengalami masalah gizi buruk dan stunting.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Menurut laman resmi yang diterbitkan oleh SIPPN MENPAN (2022), sistem, mekanisme, dan prosedur penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dirancang sebagai langkah strategis dalam mengintervensi daerah yang rawan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Adapun tahapan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan CPP meliputi:

- a) Pengajuan Usulan dari Masyarakat: Masyarakat yang membutuhkan bantuan mengajukan usulan yang diketahui oleh aparat kelurahan atau kecamatan setempat. Usulan ini mencakup data mengenai kondisi darurat, jumlah penerima, dan kebutuhan pangan yang diperlukan. Dalam proses ini, pihak kelurahan atau kecamatan juga dapat menggunakan data yang sudah tersedia, seperti data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS). Penggunaan data ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan mempercepat proses pengajuan bantuan CPP.
- b) Identifikasi oleh Tim Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota: Tim penanggulangan bencana di tingkat kabupaten atau kota melakukan identifikasi atas usulan yang masuk. Proses ini mencakup pengecekan kondisi wilayah terdampak, jumlah penduduk yang memerlukan bantuan, serta urgensi kebutuhan pangan.

- c) Verifikasi oleh Tim Provinsi: Setelah diidentifikasi, data yang diperoleh diverifikasi oleh tim penanggulangan bencana (bagi masyarakat terdampak bencana) atau instansi terkait di tingkat provinsi (bagi masyarakat miskin atau rentan yang tidak terdampak bencana). Proses ini bertujuan memastikan keabsahan data dan kesesuaian prioritas bantuan.
- d) Telaahan dan Persetujuan Gubernur: Gubernur memberikan persetujuan atas lokasi, jumlah bantuan, dan mekanisme distribusi sesuai dengan kondisi di lapangan.
- e) Penetapan Lokasi Penerima Bantuan: Penetapan ini mempertimbangkan wilayah yang paling membutuhkan dan tingkat kerawanan pangan di daerah tersebut.
- f) Penerbitan Surat Permohonan Penyaluran ke Perum Bulog: Pemerintah daerah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) atau instansi terkait mengeluarkan surat permohonan resmi kepada Perum BULOG. Surat ini mencantumkan rincian bantuan yang diperlukan, seperti jenis dan jumlah pangan yang disalurkan.
- g) Penyaluran dan Serah Terima Bantuan: Perum BULOG melakukan proses penyaluran bantuan sesuai dengan permintaan yang telah disetujui. Serah terima bantuan dilakukan kepada pemerintah daerah atau instansi pelaksana di tingkat kabupaten atau kota untuk didistribusikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Konsep Ketahanan Pangan

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dimana kebutuhan pangan di tingkat negara hingga individu dapat terpenuhi yang tercermin dari tersedianya pangan yang sesuai kapasitas, baik dari segi jumlah, mutu, keamanan, keberagaman, gizi, pemerataan, keterjangkauan, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Helin G Yudawisastro et al., 2023).

Menurut (Farida et al., 2023), ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: 1) Ketahanan pangan tinggi, dimana setiap anggota keluarga dapat mengakses pangan yang cukup untuk menjalankan aktivitas dengan baik dan menjaga kesehatan; 2) Ketahanan pangan rendah, dimana salah satu anggota keluarga merasa kesulitan untuk memperoleh pangan yang cukup karena keterbatasan keuangan; 3) Ketahanan pangan sangat rendah, dimana salah satu atau lebih anggota keluarga tidak mampu membeli bahan pangan pokok yang diperlukan.

Konsep Kelompok Rentan

Menurut (Irawan & Haris, 2022), kelompok rentan adalah sekelompok individu atau keluarga yang memiliki risiko lebih tinggi untuk menghadapi kesulitan atau penderitaan akibat faktor-faktor tertentu, baik yang berasal dari kondisi internal (misalnya kesehatan, pendidikan, atau ekonomi) maupun eksternal (seperti bencana alam, konflik sosial, atau ketidaksetaraan). Kelompok rentan seringkali tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan atau untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga mereka lebih mudah terjerat dalam kemiskinan, kesulitan ekonomi, dan kesulitan sosial lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Waruwu, 2023), penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Sementara itu, metode deskriptif dalam penelitian kualitatif menggambarkan objek penelitian, melalui kata-kata, gambar atau angka non-statistik (Syahrizal & Jailani, 2023). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena tertentu secara mendalam dan holistik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga rentan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan program CPP di tingkat desa.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, efektivitas implementasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga rentan di Desa Godog. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi program tersebut. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi, yang semuanya memiliki peran penting dalam kesuksesan pelaksanaan program.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Desa Godog dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah yang menerima manfaat dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai buruh tani dan peternak kecil. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang relevan untuk mengkaji keberhasilan program dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga rentan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penerapan Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan

Sejak tahun 2022, program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) mulai diimplementasikan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, sebagai bagian dari upaya nasional untuk mendukung ketahanan pangan keluarga rentan. Program ini bertujuan untuk menyediakan cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak kerawanan pangan, berada di zona kemiskinan, atau masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui dukungan pemerintah desa dan kelompok masyarakat, program Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Godog diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dengan memastikan setiap keluarga memiliki akses yang pangan yang cukup merata, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat rentan.

Penduduk di Desa Godog sebagian besar bekerja sebagai buruh tani, dengan beberapa diantaranya menggantungkan penghasilan dari sektor peternakan kecil-kecilan, seperti pemeliharaan unggas. Penghasilan rata-rata keluarga di Desa Godog berkisar antara Rp 1.000.000 hingga 2.000.000 per bulan, yang sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, terutama pada musim paceklik atau ketika harga pangan meningkat tajam. Dalam konteks ini, program Cadangan Pangan Pemerintah memberikan bantuan berupa beras paket 10 kg per bulan. Program ini dirancang untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan memastikan mereka tetap memiliki akses pangan yang memadai.

Hasil wawancara dengan beberapa penerima manfaat menunjukkan respons yang beragam terhadap implementasi program Cadangan Pangan Pemerintah. Misalnya, salah satu penerima manfaat yang menyatakan:

“Saya sangat terbantu dengan program ini. Setiap bulan saya menerima beras 10 kg yang sangat membantu meringankan pengeluaran keluarga saya. Sebagai buruh tani,

penghasilan suami saya tidak menentu, sehingga bantuan ini benar-benar berarti bagi kami.” (Ibu Siti, 28 November 2024).

Namun, ada pula tantangan yang dirasakan oleh seorang petani dan menyatakan bahwa: *“Program ini bagus, tetapi kadang distribusinya terlambat yaa mungkin karena kondisi jalan yang rusak. Selain itu, tidak semua warga yang membutuhkan terdaftar sebagai penerima manfaat.”* (Wawancara dengan peternak setempat, 28 November 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Godog telah berjalan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan masyarakat. Warga penerima manfaat mengapresiasi keberadaan program ini karena secara langsung membantu mereka mengurangi pengeluaran kebutuhan pangan. Dengan adanya bantuan berupa beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya, masyarakat dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan lain yang tidak kalah penting. Meskipun demikian, program ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur jalan yang memengaruhi kelancaran distribusi dan ketepatan waktu dalam menerima bantuan.

Kebutuhan pangan yang mencukupi sangat vital untuk memastikan pola makan yang sehat dan seimbang. Program Cadangan Pangan Pemerintah membantu meringankan beban biaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, sehingga mereka dapat mengalokasikan uang untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Mengingat kondisi ekonomi yang sering berubah, sangat penting untuk memperbaiki dan mengevaluasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bantuan ini dapat terus tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan

Efektivitas implementasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berdasarkan teori Edward III, empat elemen utama yang memengaruhi implementasi program meliputi *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (sikap atau perilaku), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program dalam mendukung ketahanan pangan keluarga rentan di Desa Godog.

a) *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi yang efektif menjadi faktor krusial dalam setiap tahap implementasi program. Berdasarkan hasil penelitian, sejak dimulainya pelaksanaan program Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Godog, komunikasi antara pihak desa dan pusat berjalan lancar, tanpa adanya miskomunikasi. Pemerintah desa aktif menyampaikan informasi terkait program CPP, seperti jadwal distribusi, jenis bantuan yang akan diterima, dan mekanisme pengambilan bantuan, melalui berbagai saluran komunikasi. Saluran ini meliputi pertemuan rutin di balai desa, serta grup WhatsApp yang melibatkan kepala dusun dan perwakilan masyarakat.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa Godog yang menyampaikan:

“Kami selalu memastikan informasi terkait jadwal distribusi dan jenis bantuan disampaikan jauh-jauh hari, minimal seminggu sebelumnya. Warga juga diberi kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum jelas.” (Wawancara dengan Kepala Desa Godog, 28 November 2024).

Selain itu, masyarakat merasa puas dengan kejelasan informasi yang diberikan. Ibu Siti (45 tahun), salah satu penerima manfaat menyampaikan:

“Kami tahun kapan bantuan akan datang, biasanya tanggal selalu sama setiap bulan. Kalau ada perubahan, pak Kepala Dusun pasti memberitahu kami.” (Wawancara dengan Ibu Siti, 28 November 2024).

Komunikasi yang baik ini turut berkontribusi pada kelancaran distribusi bantuan CPP, sehingga mengurangi potensi miskomunikasi atau salah paham yang dapat menghambat implementasi program.

b) *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya meliputi dana, tenaga kerja, fasilitas, dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program CPP. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang tersedia di Desa Godog umumnya mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program. Program CPP di Desa Godog memanfaatkan fasilitas desa, seperti gudang sementara untuk menyimpan bantuan pangan sebelum didistribusikan. Selain itu, aparat desa dan perangkat dusun secara aktif membantu proses distribusi. Namun terdapat kendala pada aspek infrastruktur jalan, terutama di wilayah pinggiran desa. Seorang petugas distribusi bantuan CPP, menjelaskan:

“Kami sering kesulitan mengirim bantuan ke area Desa Godog karena jalanan yang rusak, apalagi kalau musim hujan. Kadang-kadang distribusi jadi

terlambat karena truk pengangkut harus berjalan pelan ketika melewati jalan ini.” (Wawancara dengan petugas distribusi bantuan CPP, 28 November 2024).

Meskipun begitu, petugas berusaha mengatasi kendala ini dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, sehingga distribusi tetap berjalan dengan lancar.

c) *Disposition* (Sikap atau Perilaku Pelaksana)

Sikap atau disposisi pelaksana program di Desa Godog berperan besar dalam keberhasilan implementasi program CPP. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana program menunjukkan sikap yang responsif, peduli, dan proaktif dalam mendukung masyarakat penerima manfaat. Salah satu penerima manfaat CPP di Desa Godog menyampaikan:

“Petugas desa disini ramah dan selalu siap membantu. Kalau ada masalah, kami bisa langsung lapor dan mereka segera mencari solusi. Ini sangat membantu kami sebagai warga.” (Wawancara dengan Ibu Ani, 28 November 2024).

Namun, ada beberapa keluhan terkait responsivitas dalam menangani kasus tertentu. Misalnya dalam hal pendataan ulang penerima manfaat, masyarakat merasa prosesnya terlalu lambat. Salah satu warga yang bekerja sebagai buruh tani, menyebutkan:

“Ada tetangga saya yang sudah tidak layak dapat bantuan karena ekonominya membaik, tapi belum dicoret dari daftar bantuan beras. Sementara, ada warga yang lebih butuh malah belum masuk data.” (Wawancara dengan buruh tani setempat, 28 November 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sikap pelaksana umumnya positif, peningkatan dalam respons terhadap pembaruan data masih sangat diperlukan.

d) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan CPP melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan desa. Proses birokrasi dalam program ini cukup kompleks, terutama dalam aspek pendataan dan distribusi bantuan. Kepala Desa Godog menjelaskan:

“Kami hanya menjalankan tugas sesuai data yang diberikan oleh Dinas Sosial. Jika ada masyarakat yang merasa tidak puas, kami biasanya menjelaskan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami

juga rutin melaporkan kendala yang ada kepada pihak terkait.” (Wawancara dengan Kepala Desa Godog, 28 November 2024).

Beberapa warga juga mengungkapkan ketidakpuasan terkait proses pendataan. Misalnya pekerja pabrik yang mengatakan:

“Saya heran, kenapa ada yang lebih mampu justru dapat bantuan, sementara yang lebih membutuhkan malah tidak terdaftar. Kami sudah lapor ke aparat desa, tapi mereka bilang datanya memang dari pusat.” (Wawancara dengan pekerja pabrik, 28 November 2024).

Selain itu, mekanisme distribusi barang juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap program ini. Karena bantuan berupa barang, bukan uang tunai, masyarakat kadang mempertanyakan jumlah dan kualitas barang yang diterima. Meskipun demikian, aparat desa dan pihak kecamatan tetap berusaha menjembatani aspirasi masyarakat dengan dinas terkait, serta memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Pendekatan ini membantu meredakan ketegangan yang muncul akibat kesalahpahaman terkait mekanisme program CPP.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan

Implementasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Godog dalam mendukung ketahanan pangan keluarga rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa. Oleh karena itu pemahaman tentang faktor-faktor tersebut menjadi krusial untuk menilai efektivitas pelaksanaan program ini.

a) Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi program CPP di Desa Godog adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa secara rutin menyampaikan informasi terkait jadwal distribusi bantuan dan jenis pangan yang diterima melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan di balai desa dan grup WhatsApp yang melibatkan kepala dusun dan perwakilan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat tepat waktu dan mengurangi potensi miskomunikasi. Selain itu, sumber daya yang memadai, seperti tenaga kerja dari aparat desa dan perangkat dusun, turut mendukung

kelancaran distribusi bantuan. Fasilitas desa, seperti gudang sementara untuk menyimpan bantuan juga memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran alur distribusi bantuan pangan.

b) Faktor Penghambat

Meskipun terdapat faktor pendukung yang kuat, implementasi program CPP di Desa Godog juga menghadapi beberapa tantangan yang menghambat efektivitas program. Salah satu hambatan utama adalah masalah infrastruktur, terutama kerusakan jalan yang mempengaruhi kelancaran distribusi bantuan ke wilayah pinggiran desa. Pada musim hujan, distribusi seringkali terlambat karena kendaraan pengangkut bantuan harus melewati jalan yang rusak. Selain itu, kendala juga muncul dalam pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak selalu diperbarui secara tepat waktu. Beberapa warga mengeluhkan bahwa mereka yang sudah tidak layak menerima bantuan masih terdaftar, sementara beberapa yang lebih membutuhkan justru belum masuk dalam daftar penerima manfaat. Proses birokrasi yang rumit dan kurangnya transparansi dalam pendataan ini turut menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap program CPP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang efektivitas implementasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga rentan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Keberhasilan Implementasi Program: Program CPP di Desa Godog telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga rentan. Bantuan berupa pangan, terutama beras paket 10 kg, telah membantu meringankan beban pengeluaran keluarga miskin yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan peternak. Program ini memungkinkan masyarakat untuk lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
- b) Faktor Pendukung: Faktor komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat serta ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti fasilitas penyimpanan dan tenaga kerja telah mendukung kelancaran distribusi bantuan program CPP. Proses distribusi yang terorganisir dan informasi yang jelas terkait jadwal serta

jenis bantuan juga sangat membantu masyarakat untuk merencanakan kebutuhan mereka.

- c) Faktor Penghambat: Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi program adalah infrastruktur yang buruk, khususnya kondisi jalan yang rusak di wilayah pinggiran desa sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan CPP. Selain itu, masalah dalam pembaruan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak selalu tepat waktu juga menambah tantangan, mengingat ada warga yang tidak layak namun tetap terdaftar, sementara yang membutuhkan justru belum terdaftar.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka untuk meningkatkan efektivitas implementasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga rentan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, peneliti memberikan rekomendasi meliputi:

- a) Perbaikan Infrastruktur: Pemerintah desa dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan kondisi infrastruktur jalan yang rusak untuk memastikan distribusi bantuan beras dari program CPP dapat berjalan secara tepat waktu. Penggunaan teknologi untuk distribusi atau peningkatan akses transportasi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini.
- b) Pembaruan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM): Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sangat penting untuk memperbarui dan memvalidasi data KPM secara berkala. Pemerintah desa perlu meningkatkan responsivitas terhadap pembaruan data penerima manfaat dengan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa hanya keluarga yang benar-benar membutuhkan yang mendapat bantuan program CPP.

DAFTAR REFERENSI

- Ariska, A. (2023). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. [Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare].
- Badan Pangan Nasional. (2024). Jangan keliru, ini perbedaan bantuan pangan beras dengan bantuan sosial lainnya. Jakarta: Badan Pangan Nasional. <https://badanpangan.go.id/blog/post/jangan-keliru-ini-perbedaan-bantuan-pangan-beras-dengan-bantuan-sosial-lainnya>
- Dinas Pangan dan Tanaman Pangan serta Hortikultura. (2022). Bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka intervensi daerah rawan pangan dan stabilisasi harga pangan (pp. 1–2). Jakarta: Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Farida, I., Ningsih, L., Aini, N., Kasiari, N., Nurdiana, P., Maharany, S., & A'yun, Q. (2023). Menciptakan masyarakat mandiri secara sosial ekonomi melalui program ketahanan pangan di Desa Alassapi. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 47–54. <https://doi.org/10.58355/engagement.v2i1.19>
- Helin G Yudawisastra, Hanim, W., Siti Mardiana, Alfiana, Sugiartiningsih, Suparjiman, Tris Sudarto, Eris Sudarisman, & Qur'ani Noor, H. (2023). Budikdamber akuaponik sebagai strategi ketahanan pangan dan stimulus kewirausahaan saat pandemi Covid-19. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 3(2), 162–170. <https://doi.org/10.37373/bemas.v3i2.258>
- Husen, P., Palinggi, Y., & Dwijatenaya, I. B. M. A. (2023). Implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik [JIMAP]*, 2(2), 1–23.
- Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 35–54. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2024). Penyaluran bantuan CPP berupa beras tahun 2024 memperluas cakupan kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan. Jakarta: KEMENKO PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/penyaluran-bantuan-cpp-berupa-beras-tahun-2024-memperluas-cakupan-kepada-masyarakat-yang-belum>
- Khaerudin, M. R., Wati, L., & Rantau, M. I. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Puskesmas Rajeg). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 506–517.
- Kusumawardani, A. S., & Isbandono, P. (2024). Implementasi kebijakan kesehatan masyarakat (Peran DP3AKB) pada program pencegahan stunting di Desa Tanjungharjo. *Inovant: Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 3(4), 125–133.

- Mirza, & Aisyah, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 14–34. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.18>
- Murdani, A., Nurdyansa, & Syaharuddin. (2023). Efektivitas penggunaan teknologi komunikasi terhadap kinerja aparat di Desa Wejang Mali Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur. *Journal of Communication Research*, 1(1), 38–48.
- Puspitaningrum, D. A., Hikmah, K., & Nur, A. (2023). Stunting: Fenomena, realita, solusi. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Rahmatillah, A., Alqarni, W., & Afrijal. (2023). Implementasi program Aceh Green ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3), 1–14. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip>
- Salvator, M., & Heremba, N. K. (2023). Efektivitas penyebaran informasi publik melalui website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i1.3137>
- Santoso, Y. A., & Angela, V. F. (2023). Efektivitas kinerja pelayanan Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam upaya keterjaminan persediaan pangan. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 12(2), 247–258. <https://doi.org/10.37304/jispar.v12i2.9503>
- Seftiyana, Y., & Alwi. (2024). De-Coupling Games: Peran multi aktor dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Utara. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 227–238.
- Sulistiwati, D., Rachmayanti, A., Rahayu, P. S., Anggraeni, P., & Hidayat, Q. (2024). Implementasi sistem informasi manajemen pegawai. *Refresh: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1–7.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Triyono, A., Soemartono, T., & Nugroho, F. (2024). Penerbitan perizinan dalam masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus di UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–12.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), a2896–2910. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>